



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI KRISTANTO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG II
3. NHK : 260501

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.930.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/100 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 180 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 1235 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/32 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **345.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, ERTIGA GL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA CB100 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **37.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **200.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

2.512.000.000

III. HUTANG

Rp.

451.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.061.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.